

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, situasi politik Indonesia belum sepenuhnya stabil. Belanda berupaya mengembalikan pengaruh kolonialnya melalui kebijakan federalisme¹ dengan membentuk sejumlah negara bagian yang tergabung dalam Republik Indonesia Serikat (RIS).² Salah satu negara bagian yang lahir dari kebijakan tersebut adalah Negara Pasundan yang meliputi wilayah Jawa Barat. Pembentukan Negara Pasundan merupakan bagian dari strategi Belanda untuk mempertahankan pengaruh politiknya sekaligus membatasi kekuatan Republik Indonesia yang sedang memperjuangkan kedaulatan penuh.³

Upaya pembentukan Negara Pasundan mulai tampak melalui aktivitas Partai Rakyat Pasundan (PRP) yang dipimpin oleh Suria Kartalegawa. Pada 4 Mei 1947, Suria Kartalegawa memproklamasikan Negara Pasundan dengan dukungan pejabat kolonial Belanda, seperti Van Mook, Kolonel Thomson, dan Residen Klaassen. Dukungan tersebut tidak hanya bersifat politik, tetapi juga mencakup penyediaan dana, sarana transportasi, serta penyebaran undangan untuk menggalang dukungan masyarakat.⁴ Fakta ini menunjukkan bahwa lahirnya Negara

¹Federalisme adalah sistem pemerintahan di mana negara terbagi menjadi beberapa entitas negara bagian yang mempunyai otonomi tertentu, sementara pemerintah pusat mengurus urusan nasional. Di Indonesia, federalisme diimplementasikan pada periode RIS (1949-1950) sebagai bagian dari strategi Belanda. Sumber: MM. Dr. Agus Wibowo, M.Kom., M.Si., MM.Dr. Dra Dyah Listyarini, SH., MH., *Hukum Pemerintah Daerah* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023). Hlm 26

² RIS adalah federasi Indonesia yang terbentuk setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) dan diatur oleh Konstitusi RIS 1949? Bentuk negara ini bersifat federasi dan akhirnya dibubarkan pada 1950. Sumber: Irvan Tasnuri and Muhammad Fadli, "Republik Indonesia Serikat Tinjauan Historis Hubungan Kausalitas Peristiwa-Peristiwa Pasca Kemerdekaan Terhadap Pembentukan Negara RIS (1945-1949)," *Candrasangkala* 5, no. 2 (2019): 58–67. Hlm 60

³ Nurul Fatimah, "Federalisme Belanda Dan Pembentukan Negara Pasundan 1947–1950," *Jurnal Sejarah Dan Budaya* 12 No 01 (2021). Hlm 23-24

⁴ Helius Sjamsuddin et al., *Menuju Negara Kesatuan : Negara Pasundan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992), http://repositori.kemdikbud.go.id/12480/1/Menuju_Negara_Kesatuan_Negara_Pasundan.pdf. Hlm 31-32

Pasundan tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik Belanda dalam menjalankan proyek federalisasi di Indonesia.

Meskipun demikian, pembentukan Negara Pasundan tidak memperoleh dukungan luas dari masyarakat Jawa Barat. Penolakan datang dari berbagai kalangan, termasuk Paguyuban Pasundan, tokoh-tokoh Sunda, serta keluarga besar Wiranatakusumah yang menyampaikan keberatan mereka kepada Presiden Soekarno. Di berbagai daerah juga muncul rapat-rapat umum yang menentang keberadaan Negara Pasundan karena dianggap bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia.⁵ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa legitimasi politik Negara Pasundan di mata masyarakat Jawa Barat relatif lemah sejak awal pembentukannya.

Penolakan terhadap Negara Pasundan juga muncul dari kalangan umat Islam. Organisasi-organisasi Islam di Jawa Barat memandang negara bagian tersebut sebagai bagian dari strategi kolonial Belanda yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Dalam perkembangan selanjutnya, sejumlah organisasi Islam membentuk Majelis Persatuan Umat Islam (MPUI) sebagai wadah untuk menyatukan sikap politik umat Islam dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkembang di Jawa Barat.⁶ Sikap tersebut menunjukkan bahwa umat Islam tidak hanya berperan dalam bidang keagamaan, tetapi juga terlibat aktif dalam dinamika politik pada masa revolusi.

Selain itu, partai-partai Islam seperti Masyumi dan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) menunjukkan sikap yang tegas terhadap keberadaan negara-negara bagian bentukan Belanda. Bagi mereka, sistem federal dipandang tidak sejalan dengan semangat persatuan nasional dan berpotensi menghambat terwujudnya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.⁷ Pandangan tersebut

⁵ Sjamsuddin et al. hlm 34

⁶ Sjamsuddin et al. hlm 72

⁷ Deliar Noer, *Partai Islam Di Pentas Nasional, 1945-1965* (Jakarta: Grafiti Pers, 1987). Hlm 145-147

memperlihatkan bahwa perjuangan politik umat Islam pada masa revolusi memiliki keterkaitan erat dengan upaya mempertahankan keutuhan Republik Indonesia.

Sikap penolakan tersebut juga tercermin dalam pemberitaan surat kabar Keng Po yang melaporkan bahwa Masyumi menentang gagasan pembentukan negara Islam di Pasundan. Meskipun berlandaskan nilai-nilai Islam, Masyumi menilai bahwa pembentukan negara Islam di Jawa Barat justru dapat mengancam persatuan nasional. Oleh karena itu, partai tersebut lebih mendukung pengembalian Pasundan ke dalam Republik Indonesia.⁸

Di sisi lain, kondisi politik dan keamanan di Jawa Barat semakin kompleks setelah Perjanjian Renville yang mengharuskan Divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah. Kekosongan kekuatan militer Republik di Jawa Barat kemudian dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo untuk memperkuat gerakan Tentara Islam Indonesia (TII). Bersamaan dengan itu, pemerintahan Negara Pasundan menghadapi berbagai persoalan internal, mulai dari lemahnya dukungan masyarakat hingga ketergantungannya terhadap Belanda.

Memasuki tahun 1950, posisi Negara Pasundan semakin terdesak. Peristiwa Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) memperburuk citra pemerintahan Pasundan dan mendorong munculnya tuntutan yang semakin kuat untuk membubarkan negara bagian tersebut. Situasi ini diperparah oleh pengunduran diri R.A.A. Wiranatakusumah sebagai Wali Negara.⁹ Bahkan sejumlah laporan pers menunjukkan bahwa sebagian elite politik Pasundan mulai menyadari bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia akan lebih mudah dicapai melalui Republik Indonesia daripada melalui sistem federal bentukan Belanda.¹⁰

Pada akhirnya, runtuhnya Negara Pasundan menjadi bagian dari proses kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan. Pembubaran Negara Pasundan

⁸ Keng Po, "Masjumi Tegen Vorming van Islamitische Staat," di kutip dalam Surat kabar *Deli Courrant*, 1947.

⁹ Rega Resdiyawan, Agus Mulyana, and Wildan Insan Fauzi, "R . A . A . Wiranatakusumah V ; Tokoh Republikan Sebagai Wali Negara," *Jurnal Upi* Volume 14 (2025): 133–46. Hlm 141

¹⁰ "Nieuwe Banden Tussen Java's Bevolking," di kutip dalam *Pers Pekerja*, 1950.

dan negara-negara bagian lainnya menandai kemenangan gagasan unitarisme¹¹ dan nasionalisme Indonesia atas sistem federal yang dianggap sebagai warisan politik kolonial.¹² Oleh karena itu, penelitian mengenai Negara Pasundan dan Respons Politik Umat Islam Jawa Barat dalam Proyek Federalisasi Belanda 1947-1950 menjadi penting untuk memahami bagaimana umat Islam di Jawa Barat merespons pembentukan Negara Pasundan serta peran mereka dalam proses reintegrasi Jawa Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejumlah penelitian mengenai Negara Pasundan umumnya berfokus pada aspek politik, federalisme Belanda, serta dinamika hubungan antara Negara Pasundan dan Republik Indonesia. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji respons umat Islam terhadap keberadaan Negara Pasundan pada periode 1947-1950 masih relatif terbatas. Padahal, umat Islam di Jawa Barat memiliki peran penting dalam membentuk sikap politik masyarakat melalui organisasi-organisasi Islam, partai politik, dan tokoh-tokoh keagamaan yang terlibat dalam upaya mempertahankan integrasi nasional. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan memfokuskan pembahasan pada bentuk-bentuk respons umat Islam terhadap Negara Pasundan pada tahun 1947-1950 serta pengaruhnya terhadap proses kembalinya Jawa Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, pembentukan Negara Pasundan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1948 merupakan bagian dari strategi politik federalisasi yang bertujuan melemahkan kedudukan Republik Indonesia. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan,

¹¹ Unitarisme adalah sistem pemerintahan dengan bentuk negara kesatuan (unitary state), di mana tidak ada pembagian konstitusional negara bagian seperti dalam federasi. Di Indonesia, aliran unitaris menguat setelah periode federal dan akhirnya pemerintah memilih kembali bentuk negara kesatuan. Sumber: Prof. Dr. Djoko Suryo JUNAIDI MUSLIM, "ANTARA UNITARISME DAN FEDERALISME: KESULTANAN TERNATE PADA MASA REVOLUSI, 1945-1950" (Universitas Gajah Mada, 2014). Hlm 22

¹² M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c.1200*, 4th ed (Stanford: Stanford University Press, 2008). Hlm 446-447

terutama umat Islam di Jawa Barat yang memandang langkah ini bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji hubungan antara kebijakan kolonial Belanda dan respons politik-keagamaan masyarakat Islam di daerah tersebut. Maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana stuktur politik dan proyek federalisasi Belanda di Jawa Barat?
2. Bagaimana bentuk respons umat Islam terhadap pembentukan Negara Pasundan, baik dari segi organisasi, tokoh, maupun wacana politik keagamaan di Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan stuktur politik dan proyek federalisasi Belanda di Jawa Barat.
2. Menganalisis bentuk respons umat Islam terhadap pembentukan Negara Pasundan, baik melalui organisasi, tokoh, maupun wacana politik keagamaan di Jawa Barat.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, kajian pustaka berperan penting untuk memberikan landasan teoritis dan memperlihatkan sejauh mana penelitian terdahulu telah membahas topik mengenai pembentukan Negara Pasundan serta dinamika respons umat Islam pada masa tersebut. Melalui telaah terhadap berbagai sumber pustaka, penulis berupaya memahami konteks historis, politik, dan keagamaan yang melatarbelakangi lahirnya Negara Pasundan pada periode 1947-1950, sekaligus menempatkan posisi penelitian ini di antara studi-studi sebelumnya.

1. Penelitian Yohanes Edi Sunarya (1991) yang berjudul “Sekitar Negara Pasundan 1947” memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pembentukan Negara Pasundan oleh pihak Belanda pasca-Agresi Militer I. Dalam penelitiannya, Sunarya menjelaskan latar belakang politik, struktur pemerintahan, serta tokoh-tokoh utama yang berperan dalam pembentukan

negara federal tersebut. Fokus kajian Sunarya berada pada proses pembentukan Negara Pasundan dan aktor-aktor politik di tingkat elit pemerintahan. Dengan demikian, penelitian tersebut belum menyoroti bagaimana respons kelompok sosial di tingkat masyarakat, khususnya umat Islam. Berbeda dengan itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada bagaimana umat Islam merespons pembentukan Negara Pasundan sebagai bagian dari dinamika sosial-politik di luar lingkup elit. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan fokus pada dimensi sosial-keagamaan yang tidak dikaji dalam penelitian Sunarya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Junaedi (1989) dalam skripsinya berjudul “Runtuhnya Negara Pasundan” membahas posisi dan peran kaum menak di Jawa Barat selama masa berdirinya Negara Pasundan. Junaedi menjelaskan bahwa melalui dukungan Belanda, kaum menak berhasil mempertahankan kedudukan mereka dengan menempati jabatan penting dalam pemerintahan, seperti tokoh Suriakartalegawa, Juarsa, Wiranatakusumah, dan Sewaka. Namun, setelah Negara Pasundan dibubarkan dan Jawa Barat kembali ke Republik Indonesia pada tahun 1950, dominasi sosial-politik kaum menak pun berakhir. Kajian Junaedi berfokus pada elite sosial tradisional (kaum menak) dalam struktur kekuasaan formal, sehingga belum membahas peran umat Islam sebagai kekuatan sosial-keagamaan. Berbeda dengan itu, penelitian ini mengkaji respons umat Islam dan organisasi keagamaan sebagai aktor sosial di luar struktur elite. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perbedaan fokus pada kelompok keagamaan yang belum dibahas dalam penelitian Junaedi.
3. Artikel Khopipah Fauziah (2023) berjudul “Antara Negara Pasundan Kartalegawa dengan Negara Pasundan Wiranatakusumah (1947–1950)” yang dimuat dalam jurnal *Historia Vitae* menjelaskan bahwa pembentukan Negara Pasundan tidak terlepas dari strategi Belanda untuk melemahkan Republik Indonesia melalui sistem federal. Fauziah membahas peran dua tokoh utama, Soeria Kartalegawa dan Wiranatakusumah, yang sama-sama berasal dari kalangan bangsawan Sunda dalam dinamika politik Jawa Barat.

Fokus kajian ini berada pada peran elite Sunda dalam perubahan struktur politik, sehingga belum mengulas secara mendalam respons umat Islam terhadap dua fase Negara Pasundan tersebut. Berbeda dengan itu, penelitian ini menempatkan umat Islam sebagai subjek utama dalam melihat bagaimana mereka merespons dinamika politik tersebut dari bawah. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perspektif bottom-up yang tidak menjadi fokus dalam kajian Fauziah.

4. Skripsi Sugih Rachmat Pangersa (2021) berjudul “Kiprah Partai Rakyat Pasundan dalam Negara Pasundan (1947–1950)” menguraikan secara historis peran dan perjalanan Partai Rakyat Pasundan (PRP) sejak pembentukan hingga pembubarannya. Dalam perkembangannya, PRP berperan sebagai oposisi dalam parlemen Negara Pasundan di bawah kepemimpinan Wiranatakusumah V hingga akhirnya melemah dan bubar setelah Negara Pasundan runtuh pada tahun 1950. Kajian ini berfokus pada dinamika politik formal dan peran partai dalam sistem pemerintahan, sehingga belum membahas respons umat Islam di luar arena politik formal. Berbeda dengan itu, penelitian ini mengkaji respons umat Islam, termasuk organisasi keagamaan dan ulama, sebagai kekuatan sosial di luar struktur partai dan parlemen. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan fokus pada dimensi sosial-keagamaan yang belum menjadi perhatian dalam penelitian Sugih.
5. Skripsi Annisa Aulia Nuril (2021) yang berjudul *Peran Republik Indonesia dalam Pembubaran Negara Federal Pasundan di Jawa Barat Tahun 1948–1950* membahas latar belakang pembentukan, mekanisme pemerintahan, serta proses pembubaran Negara Pasundan hingga kembali bergabung dengan Republik Indonesia. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa pembubaran Negara Pasundan dipengaruhi oleh penolakan golongan republiken, konflik politik, dan kondisi keamanan yang tidak stabil. Fokus kajian Annisa berada pada peran Republik Indonesia serta dinamika politik yang mengakhiri keberadaan Negara Pasundan. Dengan demikian, penelitian tersebut belum mengkaji secara khusus respons umat Islam dan

organisasi-organisasi Islam terhadap keberadaan Negara Pasundan. Berbeda dengan itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada respons umat Islam, khususnya melalui organisasi-organisasi Islam, dalam menyikapi keberadaan Negara Pasundan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan fokus pada dimensi sosial-keagamaan yang belum dibahas dalam penelitian Annisa Aulia Nuril.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwa kajian mengenai Negara Pasundan umumnya masih didominasi oleh pembahasan seputar proses pembentukan negara, dinamika politik elit, struktur pemerintahan, serta peran kaum menak dan partai politik dalam sistem federal tersebut. Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami konteks politik Negara Pasundan, namun sebagian besar belum secara khusus menempatkan umat Islam sebagai subjek utama analisis. Oleh karena itu, terdapat kekosongan kajian terkait bagaimana organisasi-organisasi Islam, ulama, dan umat Islam secara lebih luas merespons keberadaan Negara Pasundan. Dengan demikian, penelitian ini memfokuskan diri pada analisis respons umat Islam sebagai perspektif sosial-keagamaan, guna melengkapi kajian yang telah ada dengan pendekatan yang lebih menekankan dimensi masyarakat (bottom-up) dalam melihat dinamika Negara Pasundan.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Sejarah, yaitu seperangkat langkah ilmiah yang dipakai sejarawan untuk merekonstruksi masa lampau secara kritis dan sistematis. Helius Sjamsuddin menegaskan bahwa metode sejarah merupakan “cara kerja ilmiah untuk meneliti, menguji, dan menafsirkan sumber-sumber masa lampau secara bertanggung jawab,” sehingga hasil penelitian tidak sekadar berupa cerita, tetapi penjelasan historis yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Metode ini juga menjadi dasar utama dalam membangun objektivitas, sebab setiap temuan harus diperoleh melalui proses verifikasi dan

penafsiran yang benar, bukan melalui asumsi atau imajinasi peneliti.¹³ Dengan demikian, penggunaan metode penelitian sejarah dalam penelitian ini ditujukan untuk memastikan bahwa rekonstruksi peristiwa dilakukan berdasarkan bukti yang sah, logika yang runtut, dan kaidah historiografi modern.

1. Heuristik

Tahap heuristik merupakan langkah awal dalam metode penelitian sejarah yang berfokus pada kegiatan mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik penelitian. Pada tahap ini, peneliti melacak berbagai jejak masa lalu berupa dokumen tertulis, arsip, buku, catatan perjalanan, sumber lisan, artefak, maupun data kuantitatif yang dapat digunakan untuk merekonstruksi peristiwa secara historis.¹⁴ Heuristik menjadi pondasi penting karena kualitas penelitian sejarah sangat bergantung pada keluasan dan kredibilitas sumber yang berhasil dihimpun.¹⁵

Kuntowijoyo menjelaskan bahwa pengumpulan sumber dalam penelitian sejarah harus disesuaikan dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Sumber tersebut dapat berupa dokumen tertulis, seperti surat, notulen rapat, arsip pemerintahan, atau catatan transaksi; artifact, seperti foto, bangunan, dan benda budaya; sumber lisan, yang diperoleh melalui wawancara dengan saksi hidup; serta sumber kuantitatif yang mencakup data-data angka yang memiliki signifikansi sosial.¹⁶ Dengan demikian, heuristik tidak hanya sekadar mengumpulkan sumber sebanyak mungkin, tetapi juga memahami di mana sumber tersebut dapat ditemukan, bagaimana cara menelusurinya, serta mengapa sumber itu relevan dengan masalah penelitian.

1) Sumber Primer

Sumber primer merupakan data asli yang berasal langsung dari pelaku, saksi, atau pihak yang hidup sezaman dengan peristiwa yang diteliti. Dokumen

¹³ Helius Sjamsuddin, "Metodologi Sejarah" (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2007). Hal 10-11

¹⁴ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014). Hal 15

¹⁵ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, kedua (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003). Hal 89

¹⁶ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Sleman, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995). Hal 73-76

resmi, surat pribadi, foto, laporan pemerintahan, notulen rapat, artefak, dan kesaksian lisan adalah contoh dari sumber primer yang memberikan kedekatan temporal serta keotentikan terhadap fakta sejarah. Baik Kuntowijoyo maupun Helius menegaskan bahwa sumber primer menjadi bahan utama yang harus diutamakan karena nilai autentiknyanya yang tinggi.¹⁷

a) Sumber Tulisan

Adapun sumber-sumber primer yang digunakan antara lain:

1. Arsip Keputusan Presiden RIS Nomor 113 Tahun 1950 tentang Pembubaran Negara Pasundan Koleksi Dispusipda Jawa Barat
2. Surat kabar *Algemeen Handelsblad* (24 November 1949), artikel berjudul “*Toestand in Pasundan is zorgwekkend*”. No. 40033, Edisi Hari, Penerbit P. den Hengst
3. Surat kabar *Algemeen Handelsblad* (29 November 1949), artikel “*Vrees in Pasundan voor Darul Islam*” No. 40037 edisi Harian, Penerbit P. den Hengst
4. Surat kabar *De Gooi* (27 Januari 1950), artikel “*Westerling voorspelt gevechten op grote schaal*” (Westerling meramalkan pertempuran besar-besaran). No. 12201, Edisi Hari, Penerbit Joh. Geradtsen comp
5. Surat kabar *De Gooi* (27 Januari 1950), artikel “*Parlement van Pasundan laat zijn premier in de steek*” (Parlemen Pasundan meninggalkan perdana menteri). No. 12201, Edisi Hari, Penerbit Joh. Geradtsen comp
6. Surat kabar *Algemeen Handelsblad* (24 Januari 1949), artikel “*Kabinetcrisis in Pasundan*”. No. 39776, edisi Hari, Penerbit: P. den Hengst
7. Surat kabar *Algemeen Handelsblad* (30 Januari 1950), artikel “*Indonesische Regerring: Geen onderhandelingen met de rebellenleider*” No. 40089, Edisi Hari, Penerbit: P. den Hengst

¹⁷ Helius Sjamsuddin, “Metodologi Sejarah.” Hal 122-123

8. Surat kabar *Algemeen Handelsblad* (9 Desember 1949), artikel “*Pasundan toont neiging naar Islam-staat*” (Pasundan menunjukkan kecenderungan menuju negara Islam). No. 40046, Edisi Hari, Penerbit: P. den Hengst
9. Surat kabar *Algemeen Handelsblad* (26 Januari 1950), artikel “*Onrust in gebied tussen Bandung en Buitenzorg*” (Kerusuhan di wilayah antara Bandung dan Buitenzorg). No. 40086, Edisi Hari. Penerbit: P. den Hengst
10. Surat Kabar *Algemeen Handelsblad* (26 Januari 1950), yang Berjudul *Nog Twee Mohammedaanse Laiders Gearresteerd* (Dua Pemimpin Muhammadiyah Di Tangkap Diduga mendirikan negara Islam di Jawa Barat), No. 40086 Edisi Hari
11. Surat Kabar *Eindhovens dagblad* (01-Maret-1950) yang Berjudul *Darul Islam bedreigt de R.I.S op West Java*, No. 138
12. Surat kabar *Algemeen Handelsblad* (11-Januari-1950) yang berjudul “*Westerling stelt termijn van zeven dagen*” No. 40073, Edisi Hari.
13. Surat Kabar *Het Nieuwsblad* (15-Desember-1949) yang berjudul “*Masjumi tegen vorming van Islamitische staat*” No. 438
14. Surat Kabar *Sin Po* (17 Desember 1947) yang berjudul *Berdirinja Negara Pasoendan Tida mepengaroehi Peroendingan Comisie 3*.
15. Surat Kabar *Sin Po* (7 Januari 1949) yang berjudul *Pembentoekan Kabinet Negara Pasundan*
16. Surat Kabar *Sin Po* (8 Februari 1949) yang berjudul *Pemerintah Pasoendan, Pengembalian dan ketentraman keamanan*.

2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah karya atau tulisan yang dibuat oleh peneliti lain yang tidak mengalami peristiwa tersebut secara langsung. Sumber ini biasanya berupa buku sejarah, artikel ilmiah, atau tulisan akademik lain yang berisi interpretasi berdasarkan sumber primer. Menurut Kuntowijoyo, sumber sekunder membantu memperluas konteks dan memberikan gambaran historiografis terhadap

suatu tema.¹⁸ sedangkan menurut Helius, sumber sekunder penting untuk memahami penafsiran yang berkembang serta mempermudah peneliti dalam merumuskan kerangka teori dan pendekatan sejarah tertentu.¹⁹

1. Helius Sjamsuddin, dkk. Menuju Negara Kesatuan: Negara Pasundan. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1992.
2. Kahin, George McTurnan. Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press, 1952.

2. Kritik

Kritik sumber merupakan tahap penelitian sejarah yang bertujuan menilai keaslian, keotentikan, dan kebenaran informasi sebelum digunakan dalam rekonstruksi sejarah. Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan terhadap aspek fisik dokumen (kritik eksternal) sekaligus menilai isi serta objektivitas informasi yang terkandung di dalamnya (kritik internal). Melalui kritik yang sistematis, peneliti dapat memastikan bahwa hanya data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan yang digunakan sebagai dasar penulisan sejarah.²⁰

1) Kritik Ekstern

1. Surat kabar *Algemeen Handelsblad* (24 November 1949), artikel berjudul “*Toestand in Pasundan is zorgwekkend*”. No. 40033, Edisi Hari, Penerbit P. den Hengst Artikel berjudul “*Toestand in Pasundan is zorgwekkend*” diterbitkan oleh surat kabar Belanda terkemuka *Algemeen Handelsblad*, yang pada masa itu menjadi salah satu media utama di Belanda. Edisi ini dapat diverifikasi melalui arsip digital Delpher (Perpustakaan Nasional Belanda). Secara autentik, sumber ini sah karena berasal dari penerbit resmi yang tercatat dan mencerminkan pandangan media Belanda terhadap

¹⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Hal 74-76

¹⁹ Helius Sjamsuddin, “Metodologi Sejarah.” Hal 124-126

²⁰ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*. Hal 1-13

kondisi politik di Negara Pasundan menjelang pengakuan kedaulatan Indonesia.

2. Surat kabar *Algemeen Handelsblad* (29 November 1949), artikel “*Vrees in Pasundan voor Darul Islam*” No. 40037 edisi Harian, Penerbit P. den Hengst Artikel “*Vrees in Pasundan voor Darul Islam*” merupakan laporan langsung dari koresponden Belanda mengenai meningkatnya aktivitas gerakan Darul Islam di Jawa Barat. Keaslian sumber dapat diverifikasi dari edisi asli yang tersimpan dalam arsip Delpher. Sebagai media Belanda, artikel ini mencerminkan sudut pandang kolonial terhadap ancaman politik Islam di Pasundan, sehingga meski autentik, isinya perlu dianalisis secara kritis karena kemungkinan bias ideologis terhadap kelompok Islam.
3. Surat kabar *De Gooi* (27 Januari 1950), artikel “*Westerling voorspelt gevechten op grote schaal*” (Westerling meramalkan pertempuran besar-besaran). No. 12201, Edisi Hari, Penerbit Joh. Geradtsen comp Artikel “*Westerling voorspelt gevechten op grote schaal*” merupakan berita wawancara dengan Raymond Westerling, yang dilaporkan segera setelah insiden APRA. Surat kabar *De Gooi* adalah media lokal Belanda yang masih beroperasi di bawah N.V. *Dagblad De Gooi en Eemlander*. Arsipnya dapat diverifikasi secara resmi melalui Delpher. Sumber ini autentik karena menggunakan kutipan langsung dari tokoh sejarah penting, namun perlu dicermati sebagai sumber yang membawa narasi membenaran dari sisi Belanda terhadap tindakan militer Westerling.
4. Surat kabar *De Gooi* (27 Januari 1950), artikel “*Parlement van Pasundan laat zijn premier in de steek*” (Parlemen Pasundan meninggalkan perdana menteri). No. 12201, Edisi Hari, Penerbit Joh. Geradtsen comp memuat liputan tentang krisis pemerintahan di Negara Pasundan setelah serangan APRA. Sebagai bagian dari edisi yang sama dengan artikel sebelumnya, sumber ini autentik dan dapat diverifikasi arsipnya. Validitasnya kuat karena memberitakan situasi politik aktual pasca penyerahan kedaulatan Indonesia. Namun, kritik ekstern menunjukkan bahwa media ini menulis

dari perspektif Belanda sehingga perlu diperhatikan bias kolonial dalam interpretasi konflik politik lokal Indonesia.

5. Surat kabar *Algemeen Handelsblad* (24 Januari 1949), artikel "*Kabinetcrisis in Pasundan*". No. 39776, edisi Hari, Penerbit: P. den Hengst, termasuk salah satu liputan awal tentang krisis politik di Negara Pasundan. Sumber ini berasal dari media Belanda yang kredibel pada masa pascaperang dan tersedia di arsip Delpher. Dari sisi autentisitas, edisi dan penerbitannya terkonfirmasi, menjadikannya sumber sah untuk menggambarkan situasi politik internal Pasundan. Akan tetapi, karena ditulis dalam konteks kolonial, berita ini perlu dibandingkan dengan sumber Indonesia agar interpretasi tidak sepenuhnya dipengaruhi sudut pandang penjajah.
6. Surat kabar *Algemeen Handelsblad* (30 Januari 1950), artikel "*INDONESISCHE REGERING: Geen onderhandelingen met de rebellenleider*" No. 40089, Edisi Hari, Penerbit: P. den Hengst diterbitkan oleh *Algemeen Handelsblad*, media besar yang banyak memberitakan dinamika politik Asia Tenggara pasca penyerahan kedaulatan. Arsip edisi ini tersedia dan dapat diverifikasi melalui Delpher.nl. Secara autentik, sumber ini valid dan kredibel karena merupakan laporan langsung tentang pernyataan resmi pemerintah Republik Indonesia yang menolak berunding dengan Raymond Westerling, pemimpin pemberontakan APRA. Tetapi, isi sumber ini tetap perlu diperlakukan dengan kehati-hatian sebagai produk jurnalisme kolonial yang merepresentasikan cara pandang Belanda terhadap stabilitas politik Indonesia baru.
7. Surat kabar *Sin Po* edisi Rabu, 17 Desember 1947 merupakan sumber primer tertulis berbentuk surat kabar yang terbit pada masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Peneliti menilai sumber ini otentik karena memuat identitas surat kabar, tanggal terbit, serta isi pemberitaan yang sesuai dengan peristiwa pembentukan Negara Pasundan pada tahun 1947. Sumber ini diperoleh secara langsung di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui Layanan Audio Visual dan Mikrofilm Lantai 8 dalam bentuk arsip

surat kabar yang telah didigitalisasi. Kondisi dokumen masih cukup baik sehingga isi pemberitaan masih dapat dibaca, meskipun kualitas cetakan mulai memudar akibat usia dokumen. Berdasarkan hasil verifikasi kritik ekstern, sumber ini memiliki keaslian dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga layak digunakan sebagai sumber penelitian sejarah.

8. Surat kabar Sin Po edisi Jumat, 7 Januari 1949 merupakan sumber primer tertulis berbentuk surat kabar yang terbit pada masa Negara Pasundan. Peneliti menilai sumber ini otentik karena memuat identitas surat kabar, tanggal penerbitan, serta pemberitaan mengenai pembentukan kabinet Negara Pasundan. Sumber ini diperoleh secara langsung di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui Layanan Audio Visual dan Mikrofilm Lantai 8 dalam bentuk arsip surat kabar yang telah didigitalisasi. Kondisi dokumen masih relatif baik dan isi berita masih dapat dibaca dengan jelas meskipun terdapat penurunan kualitas cetakan akibat usia dokumen. Berdasarkan hasil verifikasi kritik ekstern, sumber ini memiliki keaslian yang dapat dipertanggungjawabkan dan layak digunakan sebagai sumber penelitian sejarah.
9. Surat kabar Sin Po edisi Selasa, 8 Februari 1949 merupakan sumber primer tertulis berbentuk surat kabar yang terbit pada masa Negara Pasundan. Peneliti menilai sumber ini otentik karena memuat identitas surat kabar, tanggal terbit, serta pemberitaan mengenai kebijakan Pemerintah Negara Pasundan. Sumber ini diperoleh secara langsung di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui Layanan Audio Visual dan Mikrofilm Lantai 8 dalam bentuk arsip surat kabar yang telah didigitalisasi. Kondisi dokumen masih cukup baik sehingga isi berita dapat dibaca, meskipun terdapat bagian cetakan yang mulai memudar akibat usia dokumen. Berdasarkan hasil verifikasi kritik ekstern, sumber ini memiliki keaslian yang dapat dipertanggungjawabkan dan layak digunakan sebagai sumber penelitian sejarah.

2) Kritik Intern

1. Surat kabar *Algemeen Handelsblad* (24 November 1949), artikel berjudul “*Toestand in Pasundan is zorgwekkend*”. No. 40033, Edisi Hari, Penerbit P. den Hengstmenggambarkan situasi politik Negara Pasundan yang dianggap mengkhawatirkan. Secara isi, pemberitaan menonjolkan ketegangan antara kubu federalis dan republikein, dengan nada yang cenderung menyalahkan pihak republik sebagai sumber instabilitas. Pilihan diksi seperti *zorgwekkend* (mengkhawatirkan) menunjukkan kecenderungan framing negatif terhadap upaya unifikasi Indonesia. Dengan demikian berita ini sarat bias kolonial dan berfungsi membangun narasi bahwa sistem federal buatan Belanda lebih rasional dan stabil dibandingkan sistem republik yang dianggap emosional dan radikal.
2. Surat kabar *Algemeen Handelsblad* (29 November 1949), artikel “*Vrees in Pasundan voor Darul Islam*” No. 40037 edisi Harian, Penerbit P. den Hengst memperlihatkan konstruksi wacana ketakutan terhadap gerakan Islam. Media menggambarkan Darul Islam sebagai ancaman ekstrem terhadap stabilitas Negara Pasundan tanpa menelusuri akar sosial dan politiknya. Pilihan kata *vrees* (ketakutan) dan *gevaar* (bahaya) mengukuhkan stereotip Islam sebagai faktor disrupsi. Dengan demikian narasi ini dipengaruhi oleh pandangan kolonial sekuler yang ingin meneguhkan citra Belanda sebagai pembawa modernitas dan keteraturan, serta melemahkan legitimasi Islam politik di Jawa Barat.
3. Surat kabar *De Gooi* (27 Januari 1950), artikel “*Westerling voorspelt gevechten op grote schaal*” (Westerling meramalkan pertempuran besar-besaran). No. 12201, Edisi Hari, Penerbit Joh. Geradtsen comp. Artikel ini berisi kutipan langsung Raymond Westerling yang meramalkan pertempuran besar pasca-APRA. Secara isi, pemberitaan menonjolkan aspek “profesionalisme” dan “keberanian” Westerling, sementara dampak sosial pemberontakan diabaikan. Narasi tersebut membangun citra heroik

terhadap pelaku militer Belanda, memperlihatkan bias simpati pada figur kolonial. Dengan demikian isi berita ini berfungsi melegitimasi tindakan kekerasan dan menutupi dimensi kemanusiaan peristiwa APRA.

4. Surat kabar *De Gooi* (27 Januari 1950), artikel "*Parlement van Pasundan laat zijn premier in de steek*" (Parlemen Pasundan meninggalkan perdana menteri). No. 12201, Edisi Hari, Penerbit Joh. Geradtsen comp Artikel ini membahas krisis kepercayaan parlemen Pasundan terhadap Perdana Menteri Djumhana. Dari segi isi, berita menyoroti ketidakharmonisan elite lokal dengan nada merendahkan kemampuan politik pribumi. Frasa *laat in de steek* (meninggalkan) menegaskan kegagalan kepemimpinan Pasundan tanpa mempertimbangkan tekanan struktural Belanda. Dengan demikian pemberitaan ini merefleksikan bias kolonial yang berupaya mempertahankan citra Belanda sebagai kekuatan rasional di tengah "kekacauan politik" lokal.
5. Surat kabar *Algemeen Handelsblad* (24 Januari 1949), artikel "*Kabinetcrisis in Pasundan*". No. 39776, edisi Hari, Penerbit: P. den Hengst menyoroti konflik internal dalam pemerintahan Pasundan. Secara isi, berita menampilkan narasi perpecahan politik tanpa konteks tekanan kolonial. Pilihan kata *crisis* digunakan untuk memperkuat kesan instabilitas, sementara faktor eksternal Belanda diabaikan. Dengan demikian ini mendukung agenda politik federalisme dengan mengonstruksi Pasundan sebagai negara lemah dan tidak siap berdaulat, sehingga memperkuat argumentasi perlunya bimbingan Belanda.
6. Surat kabar *Algemeen Handelsblad* (30 Januari 1950), artikel "*INDONESISCHE REGERING: Geen onderhandelingen met de rebellenleider*" No. 40089, Edisi Hari, Penerbit: P. den Hengst menyajikan pernyataan resmi pemerintah Indonesia yang menolak berunding dengan Westerling. Secara isi, berita ini tampak faktual, tetapi nada bahasanya menekankan konfrontasi dan kekakuan pemerintah Indonesia. Penggunaan istilah *rebellenleider* (pemimpin pemberontak) menempatkan Westerling sebagai tokoh rasional yang berhadapan dengan kekuasaan muda yang keras

kepala. Dengan demikian ini masih mengandung bias kolonial yang menonjolkan pandangan skeptis terhadap kemampuan Republik Indonesia mengelola krisis politiknya sendiri.

7. Surat kabar Sin Po edisi 17 Desember 1947 memuat pemberitaan mengenai pembentukan Negara Pasundan yang dinyatakan tidak memengaruhi jalannya perundingan Komisi Tiga Negara (Committee of Good Offices). Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai perkembangan politik pada masa awal pembentukan Negara Pasundan serta respons berbagai pihak terhadap kebijakan federal Belanda. Bahasa yang digunakan masih menggunakan ejaan lama sehingga mencerminkan karakteristik pers pada masa tersebut. Berdasarkan hasil verifikasi kritik intern, isi pemberitaan dinilai relevan, cukup kredibel, dan dapat digunakan sebagai sumber untuk menganalisis dinamika politik menjelang berdirinya Negara Pasundan.
8. Surat kabar Sin Po edisi 7 Januari 1949 memuat informasi mengenai proses pembentukan kabinet baru Negara Pasundan di bawah kepemimpinan Djoemhana Wiriaatmadja, termasuk dinamika politik yang menyertai proses penyusunan kabinet tersebut. Isi berita memberikan informasi mengenai kondisi politik internal pemerintahan Negara Pasundan dan hubungan antarkelompok politik pada masa itu. Meskipun merupakan produk pers yang memiliki sudut pandang redaksi tertentu, isi pemberitaan masih dapat digunakan sebagai sumber sejarah setelah dibandingkan dengan sumber-sumber lain. Berdasarkan hasil verifikasi kritik intern, informasi dalam surat kabar ini dinilai cukup kredibel dan relevan untuk menjelaskan perkembangan pemerintahan Negara Pasundan.
9. Surat kabar Sin Po edisi 8 Februari 1949 memuat keterangan resmi Pemerintah Negara Pasundan mengenai program kabinet yang memprioritaskan pemulihan keamanan dan ketenteraman serta upaya memperbaiki hubungan antargolongan masyarakat. Pemberitaan ini memberikan gambaran mengenai prioritas kebijakan pemerintah dalam menghadapi situasi politik dan keamanan di Jawa Barat pada awal tahun 1949. Bahasa yang digunakan masih menggunakan ejaan lama dan

mencerminkan gaya penulisan pers pada masa Revolusi. Berdasarkan hasil verifikasi kritik intern, isi pemberitaan dinilai cukup kredibel dan relevan untuk menjelaskan kebijakan Pemerintah Negara Pasundan serta kondisi politik yang berkembang pada masa tersebut.

3. Interpretasi

Tahap interpretasi merupakan proses penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang telah melalui kritik sumber. Louis Gottschalk menjelaskan bahwa interpretasi adalah usaha sejarawan menghubungkan fakta-fakta yang telah diverifikasi ke dalam suatu hubungan yang bermakna sehingga mampu menjelaskan suatu peristiwa sejarah secara logis dan runtut.²¹ Pada tahap ini, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menafsirkan hubungan antar fakta untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya.

Dalam penelitian sejarah, interpretasi umumnya dilakukan melalui dua bentuk, yaitu interpretasi analisis dan interpretasi sintesis. Interpretasi analisis dilakukan dengan menguraikan isi sumber sejarah untuk menemukan makna dan hubungan antar peristiwa, sedangkan interpretasi sintesis dilakukan dengan menggabungkan berbagai fakta sejarah sehingga membentuk suatu kesimpulan yang utuh mengenai objek penelitian.²²

Dalam penelitian mengenai Negara Pasundan dan Respon Umat Islam Tahun 1947-1950, peneliti menggunakan teori Charles Tilly sebagai alat analisis untuk memahami respons umat Islam terhadap pembentukan Negara Pasundan. Menurut Tilly, gerakan sosial dapat dipahami melalui proses public collective claim making, yaitu tindakan kolektif yang dilakukan secara terbuka untuk menyampaikan tuntutan kepada pihak yang memiliki otoritas politik.²³ Konsep ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana organisasi-organisasi Islam di Jawa Barat

²¹ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah* (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975). Hlm 47-48

²² Ajid Thohir, *Filsafat Sejarah: Profetik, Spekulatif, Kritis* (Jakarta: KENCANA, 2011)., hlm 145

²³ Tilly Charles, *Social Movement 1768-2004* (London: Pradigma, 2004). Hlm 3-4

menyatakan penolakan terhadap Negara Pasundan yang dipandang sebagai bagian dari proyek federalisme Belanda.

Unsur pertama dalam teori Tilly adalah *collective claim making* atau pembentukan tuntutan kolektif. Dalam konteks penelitian ini, tuntutan kolektif tersebut tampak melalui sikap bersama berbagai organisasi Islam yang menolak keberadaan Negara Pasundan dan mendukung kembalinya Jawa Barat ke dalam Republik Indonesia. Penolakan tersebut tidak hanya disampaikan oleh individu-individu tertentu, melainkan menjadi sikap politik yang diartikulasikan secara terbuka oleh organisasi-organisasi Islam seperti Masyumi, Persatuan Islam (Persis), Gerakan Muslimin Indonesia (GMI), serta Majelis Persatuan Umat Islam (MPUI). Melalui berbagai pernyataan politik dan forum organisasi, kelompok-kelompok tersebut menyampaikan klaim bahwa Negara Pasundan tidak mewakili aspirasi rakyat Jawa Barat dan merupakan produk kebijakan federal Belanda.²⁴

Unsur kedua adalah *repertoires of contention* atau bentuk-bentuk aksi yang digunakan untuk menyampaikan tuntutan. Berdasarkan sumber-sumber yang ditemukan, penolakan umat Islam terhadap Negara Pasundan diwujudkan melalui berbagai tindakan politik seperti penyelenggaraan rapat umum, penerbitan resolusi dan mosi politik, pidato tokoh-tokoh Islam, serta penyebaran pandangan melalui media massa. Gerakan Muslimin Indonesia yang dipimpin K.H. Abdul Halim, misalnya, secara aktif menyelenggarakan pertemuan-pertemuan politik yang menegaskan dukungan terhadap Republik Indonesia. Selain itu, tokoh-tokoh Islam seperti Isa Anshary dan Ahmad Hassan menggunakan pengaruh intelektual dan jaringan organisasinya untuk membangun opini publik yang menolak federalisme dan mendukung negara kesatuan.²⁵ Dengan demikian, respons umat Islam tidak hanya berupa gagasan ideologis, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan kolektif yang terorganisasi.

Unsur ketiga adalah *political opportunity* atau peluang politik. Menurut Tilly, keberhasilan suatu gerakan sangat dipengaruhi oleh kondisi politik yang

²⁴ Deliar Noer, *Partai Islam Di Pentas Nasional, 1945-1965*. Hlm 145-147

²⁵ Sjamsuddin et al., *Menuju Negara Kesatuan : Negara Pasundan*. Hlm 72-78

membuka ruang bagi munculnya tuntutan kolektif. Dalam kasus Negara Pasundan, peluang politik tersebut muncul ketika legitimasi negara federal semakin melemah menjelang tahun 1950. Krisis politik yang melanda Negara Pasundan, meningkatnya tuntutan unitarisme di berbagai daerah, serta dampak Peristiwa APRA menyebabkan posisi pemerintahan Pasundan semakin terdesak.²⁶ Situasi tersebut memberikan kesempatan yang lebih besar bagi organisasi-organisasi Islam untuk menyuarakan tuntutan pembubaran Negara Pasundan dan mendorong integrasi Jawa Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, menguatnya gerakan penolakan tidak hanya disebabkan oleh kekuatan internal organisasi Islam, tetapi juga oleh perubahan situasi politik yang menguntungkan gerakan tersebut.

Unsur keempat adalah legitimasi gerakan yang oleh Tilly dijelaskan melalui konsep *worthiness, unity, numbers, and commitment* (WUNC).²⁷ Legitimasi gerakan umat Islam terhadap Negara Pasundan dapat dilihat dari keterlibatan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh sosial dan keagamaan di tengah masyarakat, kesatuan sikap berbagai organisasi Islam dalam mendukung Republik Indonesia, jumlah pendukung yang cukup luas, serta konsistensi mereka dalam memperjuangkan pembubaran Negara Pasundan. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa penolakan terhadap Negara Pasundan tidak hanya berasal dari kelompok elite politik, tetapi juga memperoleh penerimaan yang cukup besar di kalangan masyarakat Jawa Barat. Oleh karena itu, respons umat Islam terhadap Negara Pasundan dapat dipahami sebagai tindakan kolektif yang memiliki tujuan politik yang jelas, diwujudkan melalui berbagai bentuk aksi, memanfaatkan peluang politik yang tersedia, dan memperoleh legitimasi sosial yang kuat.

Berdasarkan teori Charles Tilly, respons umat Islam terhadap Negara Pasundan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai sikap politik biasa, melainkan sebagai proses pembentukan tuntutan kolektif yang terorganisasi. Melalui klaim bersama, berbagai bentuk aksi politik, pemanfaatan peluang politik, serta dukungan

²⁶ M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c.1200*. hlm 446-447

²⁷ Charles, *Social Movement 1768-2004*. Hlm 9

sosial yang luas, umat Islam menjadi salah satu kekuatan penting yang berkontribusi terhadap melemahnya legitimasi Negara Pasundan dan proses reintegrasi Jawa Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Historiografi

Tahap historiografi merupakan puncak dari metode penelitian sejarah, yaitu ketika sejarawan menyajikan hasil interpretasinya dalam bentuk tulisan ilmiah. Gottschalk menyebut bahwa historiografi adalah proses menyusun dan menuliskan rekonstruksi sejarah dengan struktur yang jelas, argumentatif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁸ Penulisan sejarah tidak hanya menceritakan kembali peristiwa masa lalu, tetapi juga menunjukkan hubungan sebab-akibat, mengorganisasi fakta secara logis, dan mengkomunikasikannya melalui gaya bahasa yang efektif.²⁹ Dengan demikian, historiografi menjadi tahap akhir yang mengubah data historis mentah menjadi narasi ilmiah yang utuh. Kuntowijoyo juga menegaskan bahwa penulisan sejarah tidak cukup hanya memaparkan rangkaian peristiwa, tetapi juga harus menghadirkan makna, struktur, dan pemahaman yang lebih dalam terhadap dinamika sosial-politik yang terjadi.³⁰

Dalam konteks penelitian mengenai Negara Pasundan dan Respons Politik Umat Islam Jawa Barat dalam Proyek Federalisasi Belanda 1947-1950, tahap historiografi digunakan untuk membangun narasi yang menjelaskan hubungan antara proyek federalisme Belanda dengan dinamika sosial-keagamaan di Jawa Barat. Penulisan disusun secara analitis untuk menggambarkan bagaimana pembentukan Negara Pasundan merupakan upaya politik kolonial, dan bagaimana umat Islam memberikan respons melalui organisasi, pernyataan tokoh, maupun wacana keagamaan.

Pembahasan dalam penulisan ini tersusun ke dalam empat bab yang saling terkait. Bab I Pendahuluan memuat latar belakang masalah yang menjelaskan konteks pembentukan Negara Pasundan oleh Belanda, rumusan masalah, tujuan

²⁸ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*. Hal 170-171

²⁹ Louis Gottschalk. Hal 173

³⁰ Kuntowijoyo, *Kesalahan Kesalahan Sejarawan* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018). Hal 72-73

penelitian, kajian pustaka, serta metode penelitian sejarah. Metode penelitian ini mencakup tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi yang digunakan sebagai kerangka kerja dalam menganalisis sumber-sumber sejarah yang relevan.

Bab II Struktur Politik dan Proyek Federalisasi Belanda serta Pembentukan Negara Pasundan di Jawa Barat membahas kebijakan federalisasi yang diterapkan oleh Belanda di Indonesia serta proses pembentukan Negara Pasundan sebagai salah satu negara bagian dalam kerangka Republik Indonesia Serikat (RIS). Bab ini juga menguraikan bagaimana struktur pemerintahan Negara Pasundan dibentuk, mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, hingga peran tokoh-tokoh politik yang terlibat di dalamnya, serta posisi Negara Pasundan dalam sistem federal bentukan Belanda.

Bab III Respons Umat Islam terhadap Pembentukan Negara Pasundan (1947-1950) membahas berbagai bentuk tanggapan umat Islam terhadap keberadaan Negara Pasundan. Bab ini menguraikan sikap organisasi-organisasi Islam, peran tokoh-tokoh Islam, serta dinamika politik yang berkembang di Jawa Barat. Selain itu, bab ini juga menganalisis bagaimana respons tersebut memengaruhi stabilitas politik Negara Pasundan serta berkontribusi terhadap proses kejatuhannya dan kembalinya wilayah tersebut ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bab IV Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah mengenai latar belakang pembentukan Negara Pasundan, bentuk respons umat Islam, serta dampaknya terhadap keberlangsungan negara tersebut. Bab ini juga memuat saran untuk penelitian lanjutan, khususnya terkait kajian sejarah politik Islam di Jawa Barat pada masa revolusi kemerdekaan dengan pendekatan yang lebih luas dan berbasis sumber-sumber lokal maupun kolonial.

Dengan demikian, tahap historiografi dalam penelitian ini tidak hanya menarasikan kembali fakta sejarah, tetapi menyusunnya menjadi pemahaman yang utuh tentang bagaimana Negara Pasundan bukan sekadar proyek federal, melainkan

arena konflik politik yang diwarnai resistensi umat Islam. Penulisan sejarah ini bertujuan menghadirkan gambaran yang objektif dan ilmiah mengenai dinamika tersebut, serta menunjukkan peran penting umat Islam Jawa Barat dalam mempertahankan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

